

# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



Dinas Penanaman Modal &  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**SULTRA**

### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dalam tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disimpulkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang dikemas dalam Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Renja Perubahan 2025 ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, diharapkan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025, dapat dijadikan acuan guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat dan daerah Sulawesi Tenggara.

Kendari, 4 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**PARINRINGI, SE, M.Si**

Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
NIP. 19771014 200312 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud.....	6
1.4 Tujuan .....	6
1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah .....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	19
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2025.....	36
BAB IV PENUTUP .....	76
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) .....	8
Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) .....	9
Gambar 3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen).....	10
Gambar 4. Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen).....	11
Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen) .....	13
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (q-on-q) (persen) .....	14
Gambar 7. Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN 2020-2024.....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tenggara (Triliun rupiah) .....	14
Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tenggara (persen) .....	15
Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tenggara (persen) .....	16
Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (Triliun rupiah) .....	16
Tabel 5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (persen) .....	17
Tabel 6. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (persen) .....	17
Tabel 7. Realisasi Investasi PMA & PMDN Sultra Triwulan I 2025 .....	19
Tabel 8. Realisasi Investasi PMA & PMDN Sultra Triwulan II 2025 .....	19
Tabel 9. Jumlah Perusahaan & Proyek Investasi Sultra Triwulan I 2025 .....	20
Tabel 10. Jumlah Perusahaan & Proyek Investasi Sultra Triwulan II 2025 .....	20
Tabel 11. Penyerapan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2025 .....	20
Tabel 12. Penyerapan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2025 .....	20
Tabel 13. Realisasi Investasi Sultra per-Kab./Kota Triwulan I 2025 .....	21
Tabel 14. Realisasi Investasi Sultra per-Kab./Kota Triwulan II 2025 .....	21
Tabel 15. TOP 5 INVESTASI SEKTOR UTAMA PMA DI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2025 .....	23
Tabel 16. TOP 5 INVESTASI SEKTOR UTAMA PMA DI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2025 .....	24
Tabel 17. MATRIKS EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 ..	25
Tabel 18. MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025 .....	41

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan merupakan bagian dalam satu kesatuan siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Rencana Kerja Perubahan dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Renja 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan kegiatan di lapangan.

Perubahan dalam Rencana Kerja dapat terjadi karena alasan beragam yang umumnya berkaitan dengan perubahan situasi, kebutuhan atau kebijakan publik internal maupun eksternal. Berikut yang menjadi alasan utama yang memicu perubahan Renja DPMPTSP Provinsi Sultra :

1. Adanya perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2025.

Kerangka ekonomi daerah adalah suatu konsep yang menggambarkan kondisi dan proyeksi ekonomi suatu wilayah (daerah) dalam periode tertentu. Perubahan tren pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan Produk Domestik

## RENJA – PERUBAHAN 2025

Regional Bruto (PDRB) daerah menjadi pemeran utama yang mempengaruhi perubahan kerangka ekonomi daerah.

### 2. Kebijakan efisiensi anggaran dan belanja publik di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nasional serta daerah Tahun Anggaran 2025 **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja** mengarahkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, **Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 900.1/1091 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Tahun 2025** menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DPMPTSP Provinsi Sultra dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta kebijakan pembangunan yang strategis.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mencerminkan kebutuhan riil pembangunan daerah, mendukung prioritas nasional, dan memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Nota Keuangan RAPBN, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, dan RAPBD** yang menitikberatkan pada penciptaan iklim investasi kondusif, penyederhanaan regulasi, dan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan efisiensi anggaran dan belanja publik di tingkat pusat dan daerah mendorong penyesuaian program dan kegiatan agar tepat sasaran, hemat biaya, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya, Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan berpedoman pada **Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Sulawesi**

**Tenggara Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029** sebagai dokumen strategis yang mengarahkan prioritas pembangunan daerah di bidang investasi, kemudahan berusaha, dan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 harus mampu mengakomodasi arahan efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

### 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan strategis baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Landasan ini menjadi dasar hukum dan arah kebijakan dalam melakukan penyesuaian terhadap perencanaan tahunan perangkat daerah guna memastikan keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program. Berikut landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

## RENJA – PERUBAHAN 2025

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- i. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana kerja daerah tahun 2025;

## RENJA – PERUBAHAN 2025

- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045;
- q. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Mei 2025;
- r. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun Anggaran 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 58);
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 12 tentang RKPDP Provinsi Sultra Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025;
- t. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 20 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 tgl 31 Juli 2025.

### 1.3 Maksud

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Renja DPMPTSP Provinsi Sultra) sampai dengan triwulan ITahun 2025, dipandang perlu melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian diantaranya :

- a. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi khususnya terkait perencanaan dan penganggaran.
- b. Perubahan gambaran kondisi ekonomi daerah khususnya terkait sektor investasi.
- c. Penyesuaian prioritas daerah.
- d. Penyesuaian sasaran daerah.
- e. Perubahan lokasi.
- f. Penambahan atau pengurangan target kinerja.
- g. Penyesuaian pagu indikatif.

### 1.4 Tujuan

Perubahan Renja 2025DPMPTSP Provinsi Sultra bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif.
- b. Adanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
- c. Mengakomodir penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi dan daerah.

### 1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Pada semester pertama (triwulan I dan triwulan II) tahun 2025 terdapat sejumlah fenomena perekonomian yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Berikut fenomena sektoral yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rilis dalam **Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik**

## RENJA – PERUBAHAN 2025

**Provinsi Sulawesi Tenggara No. 49/08/74/Th. XIX, 5 Agustus 2025** sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan II tahun 2025 secara garis besar sebagai berikut:

Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp 49,82 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 29,40 Triliun.

Ekonomi Sulawesi Tenggara semester I-2024 terhadap semester I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,44 persen. Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,91 persen.

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,89 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,07 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,11 persen.

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan II-2025 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,17 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,60 persen.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 24,57 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen

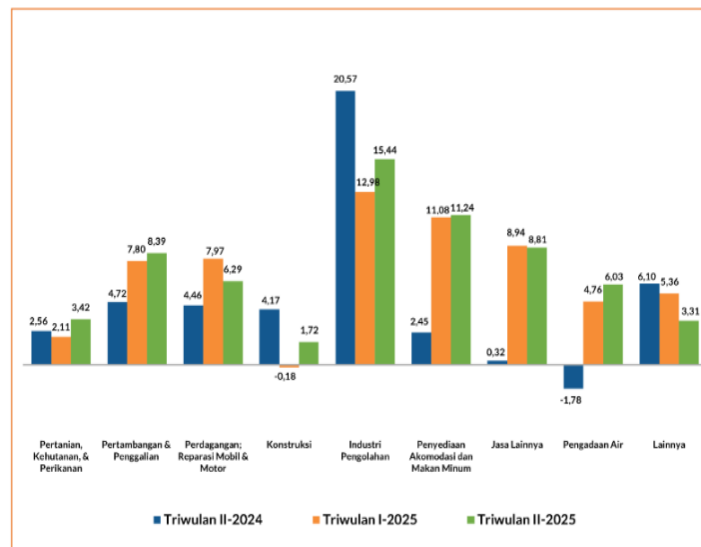
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 47,31 persen.

### 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Semester I-2025 Terhadap Semester I-2024 (c-to-c)

Ekonomi Sulawesi Tenggara semester I-2025 dibanding semester I-2024 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,78 persen. Pertumbuhan positif terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Jasa Perusahaan yang berkontraksi sebesar 0,59 persen dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontraksi sebesar 0,02 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,44 persen diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,24 persen dan Jasa lainnya sebesar 8,81 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 3,42 persen.

**Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)**

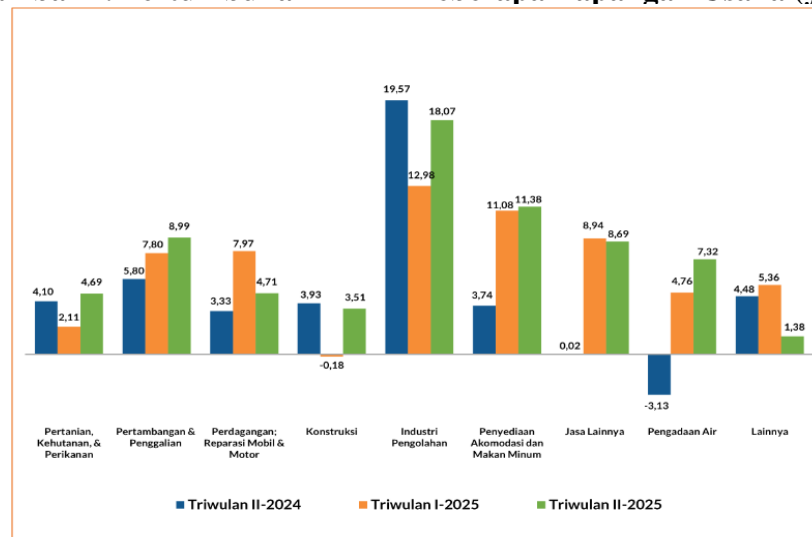


Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

b. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan II-2024 (y-on-y)

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan II-2025 dibanding triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,89 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 18,07 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,38 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki peran dominan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,69 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,72 persen diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 2,30 persen.

**Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)**



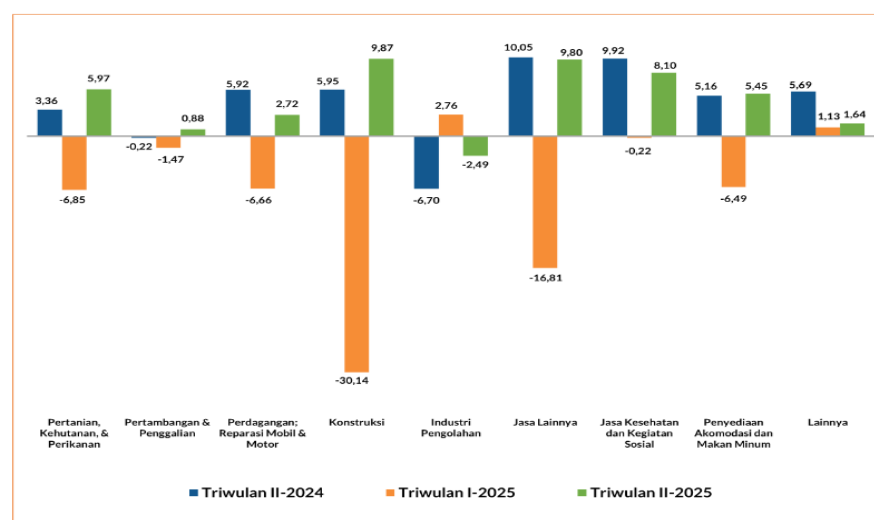
Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

c. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan I-2025 (q-to-q)

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan II-2025 dibanding triwulan I 2025 (q-to-q) tumbuh sebesar 3,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan positif yang signifikan terjadi pada

lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,87 persen; Jasa lainnya sebesar 9,80 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,10 persen. Selanjutnya kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas sebesar 3,51 persen diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 2,49 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 1,39 persen. Di sisi lain, lapangan usaha yang memiliki peran dominan seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,97 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2025 tidak banyak menunjukkan perubahan. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh beberapa lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (24,57 persen), Pertambangan dan Pengalihan (20,78 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,66 persen), dan Konstruksi (10,61 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tenggara mencapai 68,62 persen.

**Gambar 3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)**



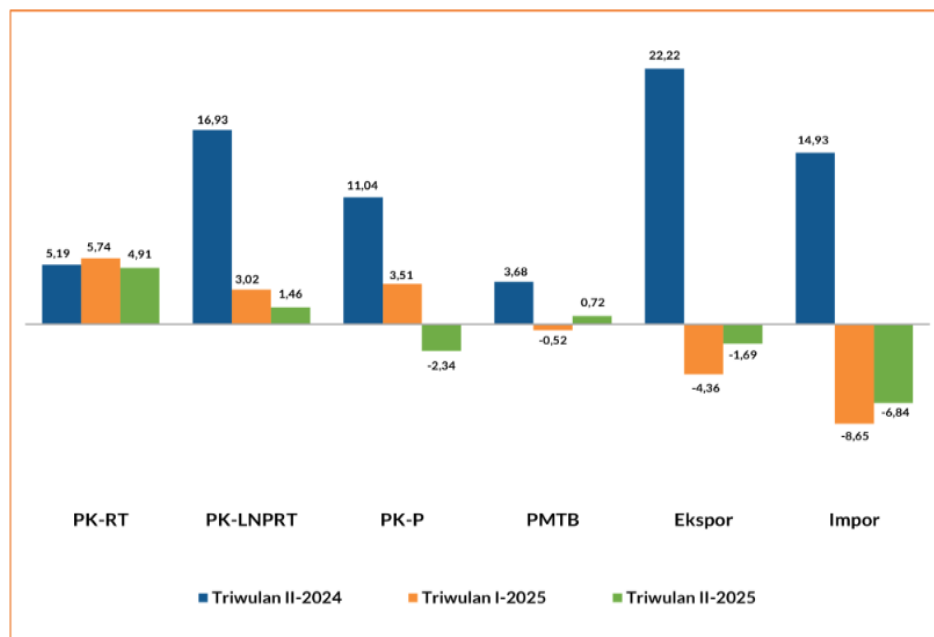
Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

### 2. PDRB Menurut Pengeluaran

a. Pertumbuhan Ekonomi Semester I-2025 Terhadap Semester I-2024 (c-to-c)

Ekonomi Sulawesi Tenggara pada semester II-2025 (c-to-c) tumbuh 5,78 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,91 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 1,46 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,72 persen. Sedangkan beberapa komponen lainnya mengalami kontraksi, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,34 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,69 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran juga tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,84 persen.

**Gambar 4. Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)**

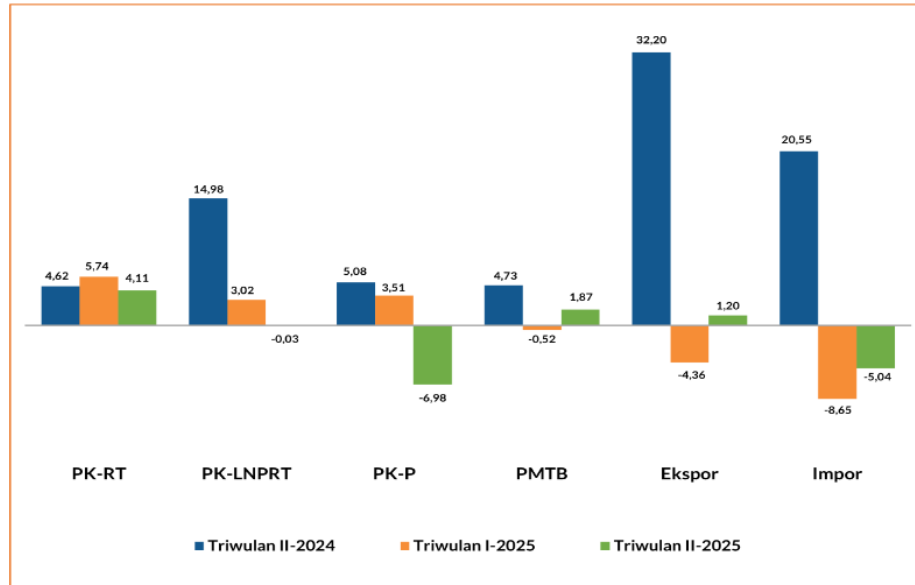


Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

b. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan II-2024 (y-on-y)

Ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh 5,89 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,11 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,87 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,20 persen. Sedangkan beberapa komponen lainnya mengalami kontraksi, diantaranya Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,98 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 0,03 persen. Komponen Impor. Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran juga tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,04 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (47,31 persen) diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa (39,15 persen); Komponen PMTB (31,97 persen); Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (11,80 persen); Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR (1,06 persen); dan Komponen Perubahan Inventori (0,13 persen). Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran memiliki peran sebesar 31,43 persen.

**Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)**

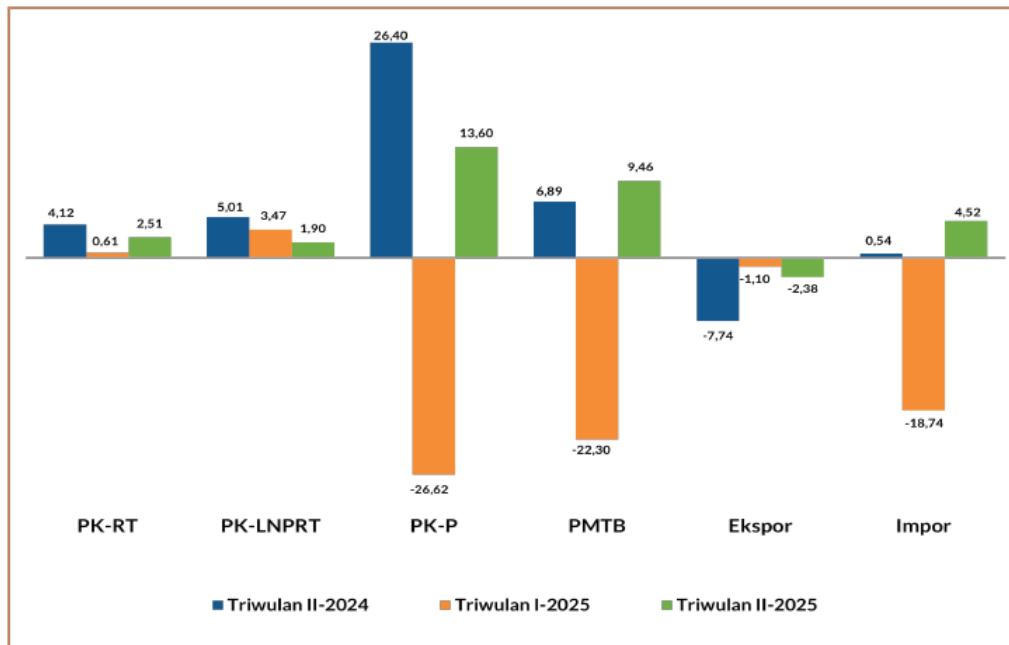


Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

c. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan I-2025 (q-to-q)

Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan II-2025 terhadap triwulan I-2025 (q-to-q) mengalami tumbuh positif sebesar 3,17 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,60 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,46 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,51 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,90 persen. Sedangkan Komponen Ekspor barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 2,38 persen. Adapun Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh positif 4,52 persen.

**Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran (q-on-q) (persen)**



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tenggara (Triliun Rupiah)**

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triwulan II-2024	Triwulan I-2025	Triwulan II-2025	Triwulan II-2024	Triwulan I-2025	Triwulan II-2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,16	11,39	12,24	6,44	6,37	<b>6,75</b>
<b>B.</b>	Pertambangan dan Penggalian	9,64	10,22	10,35	5,17	5,59	<b>5,64</b>
<b>C.</b>	Industri Pengolahan	4,18	5,16	5,08	2,50	3,03	<b>2,95</b>
<b>D.</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	<b>0,02</b>
<b>E.</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,05	0,05	<b>0,05</b>
<b>F.</b>	Konstruksi	5,07	4,80	5,29	3,00	2,82	<b>3,10</b>
<b>G.</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,83	5,99	6,31	3,62	3,69	<b>3,79</b>
<b>H.</b>	Transportasi dan Pergudangan	2,18	2,17	2,23	1,27	1,29	<b>1,30</b>
<b>I.</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,25	0,26	0,16	0,16	<b>0,17</b>
<b>J.</b>	Informasi dan Komunikasi	0,75	0,79	0,78	0,81	0,86	<b>0,85</b>
<b>K.</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	1,08	1,10	0,64	0,64	<b>0,65</b>
<b>L.</b>	Real Estat	0,52	0,53	0,54	0,38	0,39	<b>0,40</b>
<b>M,N.</b>	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,06	0,06	<b>0,06</b>

## RENJA – PERUBAHAN 2025

<b>O.</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	2,20	2,23	1,60	1,47	<b>1,49</b>
<b>P.</b>	Jasa Pendidikan	2,07	2,14	2,25	1,38	1,42	<b>1,48</b>
<b>Q.</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,39	0,42	0,30	0,28	<b>0,30</b>
<b>R,S, T,U.</b>	Jasa Lainnya	0,50	0,50	0,55	0,38	0,37	<b>0,41</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>46,22</b>	<b>47,80</b>	<b>49,82</b>	<b>27,77</b>	<b>28,50</b>	<b>29,40</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

**Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tenggara (Persen)**

Lapangan Usaha	Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q)	Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan I-2025 (q-to-q)	Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y)	Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan II-2024 (y-on-y)	Semester I-2025 Terhadap Semester I-2024 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triwulan II- 2025 (y-on-y)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-6,85	5,97	2,11	4,69	3,42	1,09
B. Pertambangan dan Penggalian	-1,47	0,88	7,80	8,99	8,39	1,67
C. Industri Pengolahan	2,76	-2,49	12,98	18,07	15,44	1,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	-3,51	8,11	2,46	5,26	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,59	4,76	7,32	6,03	0,01
F. Konstruksi	-30,14	9,87	-0,18	3,51	1,72	0,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,66	2,72	7,97	4,71	6,29	0,61
H. Transportasi dan Pergudangan	-0,47	0,96	6,81	2,94	4,83	0,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,49	5,45	11,08	11,38	11,24	0,06
J. Informasi dan Komunikasi	2,33	-0,77	6,25	5,31	5,78	0,15
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	1,55	1,75	0,08	0,90	0,00
L. Real Estat	-1,20	1,53	6,06	3,88	4,95	0,05
M,N. Jasa Perusahaan	-0,10	-1,39	1,16	-2,30	-0,59	-0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,97	0,92	7,79	-6,72	-0,02	-0,39
P. Jasa Pendidikan	5,05	4,79	3,37	7,22	5,31	0,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	8,10	2,32	0,63	1,43	0,01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-16,81	9,80	8,94	8,69	8,81	0,12
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-6,46</b>	<b>3,17</b>	<b>5,66</b>	<b>5,89</b>	<b>5,78</b>	<b>5,89</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

**Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tenggara (Persen)**

Lapangan Usaha	2024		2025	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,76	24,15	23,83	24,57
B. Pertambangan dan Penggalian	21,47	20,85	21,39	20,78
C. Industri Pengolahan	10,03	9,04	10,80	10,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,14
F. Konstruksi	10,73	10,98	10,05	10,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,25	12,60	12,53	12,66
H. Transportasi dan Pergudangan	4,62	4,72	4,55	4,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,49	0,52	0,52
J. Informasi dan Komunikasi	1,68	1,62	1,66	1,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,34	2,25	2,21
L. Real Estat	1,12	1,12	1,11	1,09
M,N. Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,20	0,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	5,25	4,60	4,47
P. Jasa Pendidikan	4,61	4,48	4,47	4,52
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,90	0,82	0,85
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,03	1,07	1,04	1,10
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

**Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (Triliun Rupiah)**

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triwulan II-2024	Triwulan I-2025	Triwulan II-2025	Triwulan II-2024	Triwulan I-2025	Triwulan II-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22,17	22,35	23,57	13,14	13,35	13,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,52	0,51	0,53	0,34	0,33	0,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,23	5,12	5,88	3,89	3,19	3,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,45	14,50	15,93	9,99	9,30	10,17

5. Perubahan Inventori	-0,59	-0,17	0,07	-0,32	-0,09	0,04
6. Ekspor Barang dan Jasa	18,34	20,22	19,50	13,82	14,33	13,99
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	15,91	14,73	15,66	13,09	11,89	12,43
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>46,22</b>	<b>47,80</b>	<b>49,82</b>	<b>27,77</b>	<b>28,50</b>	<b>29,40</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (Persen)**

Komponen	Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q)	Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan I-2025 (q-to-q)	Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y)	Triwulan II-2025 Terhadap Triwulan II-2024 (y-on-y)	Semester I-2025 Terhadap Semester I-2024 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triwulan II-2025 (y-on-y)
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,61	2,51	5,74	4,11	4,91	1,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,47	1,90	3,02	-0,03	1,46	0,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-26,62	13,60	3,51	-6,98	-2,34	-0,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-22,30	9,46	-0,52	1,87	0,72	0,67
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-1,10	-2,38	-4,36	1,20	-1,69	0,60
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-18,74	4,52	-8,65	-5,04	-6,84	-2,37
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-6,46</b>	<b>3,17</b>	<b>5,66</b>	<b>5,89</b>	<b>5,78</b>	<b>5,89</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025

**Tabel 6. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (Persen)**

Komponen	2024		2025		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		47,39	47,97	46,76	47,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		1,10	1,12	1,06	1,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		10,91	13,49	10,71	11,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto		32,26	33,42	30,33	31,97

## RENJA – PERUBAHAN 2025

5.	Perubahan Inventori	-1,44	-1,27	-0,36	0,13
6.	Ekspor Barang dan Jasa	44,24	39,68	42,31	39,15
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	34,46	34,41	30,81	31,43
	<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : BPS Sulawesi Tenggara 2025*

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan I tahun 2025, Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan target realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar Rp. 13.28 Triliun. Target ini lebih rendah dibanding target tahun 2024 sebesar Rp. 25,61 Triliun. Meskipun pada tahun 2024 realisasi investasi Sulawesi Tenggara tidak mencapai target nasional atau hanya Rp. 2,657 Triliun, namun pada tahun 2025 terhitung hingga triwulan II realisasi investasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Secara rinci, berikut data pencapaian realisasi investasi pada triwulan I dan triwulan II tahun 2025 :

**Tabel 7. Realisasi Investasi PMA & PMDN Sultra Triwulan I 2025**

<b>Realisasi investasi dari Triwulan I Januari s/d Maret 2025</b>		
<b>PMA</b>	Rp. 2.381.810.056.419	Triliun
<b>PMDN</b>	Rp. 2.075.167.060.942	Triliun
<b>TOTAL</b>	Rp. 4.456.977.117.361	Triliun

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 8. Realisasi Investasi PMA & PMDN Sultra Triwulan II 2025**

<b>Realisasi investasi dari Triwulan II April s/d Juni 2025</b>		
<b>PMA</b>	Rp. 8.013.980.160.333	Triliun
<b>PMDN</b>	Rp. 1.147.561.156.408	Triliun
<b>TOTAL</b>	Rp. 9.161.541.316.741	Triliun

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan II Tahun 2025

## RENJA – PERUBAHAN 2025

**Tabel 9. Jumlah Perusahaan & Proyek Investasi Sultra Triwulan I 2025**

<b>Jumlah Perusahaan &amp; Proyek Investasi Triwulan I Januari s/d Maret 2025</b>		
<b>Jumlah Perusahaan PMA</b>	58	Perusahaan
<b>Jumlah Proyek PMA</b>	236	Proyek
<b>Jumlah Perusahaan PMDN</b>	475	Perusahaan
<b>Jumlah Proyek PMDN</b>	2002	Proyek

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 10. Jumlah Perusahaan & Proyek Investasi Sultra Triwulan II 2025**

<b>Jumlah Perusahaan &amp; Proyek Investasi Triwulan II April s/d Juni 2025</b>		
<b>Jumlah Perusahaan PMA</b>	885	Perusahaan
<b>Jumlah Proyek PMA</b>	250	Proyek
<b>Jumlah Perusahaan PMDN</b>	127	Perusahaan
<b>Jumlah Proyek PMDN</b>	4096	Proyek

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan II Tahun 2025

**Tabel 11. Penyerapan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2025**

<b>Penyerapan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2025</b>		
<b>Tenaga Kerja Asing (PMA)</b>	102	Orang
<b>TKI perusahaan PMA</b>	892	Orang
<b>Tenaga Kerja Asing PMDN</b>	2	Orang
<b>TKI Perusahaan PMDN</b>	2494	Orang
<b>Total Tenaga Kerja TKI dan TKA PMA &amp; PMDN 2025</b>	3490	Orang

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 12. Penyerapan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2025**

<b>Penyerapan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2025</b>		
<b>Tenaga Kerja Asing (PMA)</b>	37	Orang
<b>TKI perusahaan PMA</b>	472	Orang
<b>Tenaga Kerja Indonesia PMDN TKA</b>	4	Orang
<b>Tenaga Kerja Indonesia PMDN</b>	3109	Orang
<b>Total Tenaga Kerja TKI dan TKA PMA &amp; PMDN 2025</b>	3622	Orang

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan II Tahun 2025

**Tabel 13. Realisasi Investasi Sultra per-Kab./Kota Triwulan I 2025**

<b>Realisasi Capaian Investasi Triwulan I Triwulan Januari s/d Maret 2025</b>			
1. Kabupaten Kolaka	Rp.	1.665.656.324.647	Triliun
2. Kabupaten Konawe	Rp.	1.787.594.050.023	Triliun
3. Kota Kendari	Rp.	249.928.107.834	Miliar
4. Kabupaten Konawe utara	Rp.	222.759.330.523	Miliar
5. Kabupaten Bombana	Rp.	303.477.316.113	Miliar
6. Kabupaten Konawe selatan	Rp.	124.615.100.919	Miliar
7. Kabupaten Kolaka utara	Rp.	18.308.065.021	Miliar
8. Kabupaten Konawe kepulauan	Rp.	12.085.782.166	Miliar
9. Kabupaten Wakatobi	Rp.	8.617.547.771	Miliar
10. Kota Bau-bau	Rp.	12.441.915.829	Miliar
11. Kabupaten Buton	Rp.	24.528.785.367	Miliar
12. Kabupaten Muna	Rp.	9.202.242.099	Miliar
13. Kabupaten Buton utara	Rp.	2.548.417.079	Miliar
14. Kabupaten Kolaka timur	Rp.	6.419.454.010	Miliar
15. Kabupaten Buton Tengah	Rp.	2.469.867.118	Miliar
16. Kabupaten Muna barat	Rp.	5.387.501.651	Miliar
17. Kabupaten Buton selatan	Rp.	937.309.227	Juta
<b>TOTAL</b>		<b>4.456.977.177.361</b>	<b>Triliun</b>

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 14. Realisasi Investasi Sultra per-Kab./Kota Triwulan II 2025**

<b>Realisasi Capaian Investasi Triwulan II April s/d Juni 2025</b>			
1. Kabupaten Kolaka	Rp.	6.482.266.848.144	Triliun
2. Kabupaten Konawe	Rp.	1.893.057.368.382	Triliun
3. Kota Kendari	Rp.	160.525.072.645	Miliar
4. Kabupaten Konawe utara	Rp.	192.724.749.258	Miliar
5. Kabupaten Bombana	Rp.	116.540.507.802	Miliar
6. Kabupaten Konawe selatan	Rp.	185.159.221.806	Miliar
7. Kabupaten Kolaka utara	Rp.	22.627.511.703	Miliar
8. Kabupaten Konawe kepulauan	Rp.	11.163.690.239	Miliar
9. Kabupaten Wakatobi	Rp.	8.139.679.736	Miliar
10. Kota Bau-bau	Rp.	49.668.864.863	Miliar
11. Kabupaten Buton	Rp.	1.441.685.477	Miliar
12. Kabupaten Muna	Rp.	14.485.003.264	Miliar
13. Kabupaten Buton utara	Rp.	5.333.440.250	Miliar
14. Kabupaten Kolaka timur	Rp.	15.166.294.342	Miliar
15. Kabupaten Buton Tengah	Rp.	1.181.226.401	Miliar
16. Kabupaten Muna barat	Rp.	888.761.201	Juta
17. Kabupaten Buton selatan	Rp.	1.171.391.228	Miliar
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.161.541.316.741</b>	<b>Triliun</b>

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan I tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat capaian investasi sebesar Rp. 4,456 Triliun dan mengalami peningkatan signifikan pada triwulan II tahun 2025 yakni mencapai Rp 9,161 Triliun dengan total capaian gabungan triwulan I dan II menyentuh angka Rp. 13.6 Triliun. Realisasi ini melampaui target realisasi investasi tahun 2025 senilai Rp. 13,28 Triliun atau presentase capaian sebesar 102,54%. Pencapaian realisasi tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Secara rinci, terdapat beberapa daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian total investasi ini (triwulan I dan triwulan II). Kabupaten Kolaka menempati peringkat tertinggi dengan nilai investasi sebesar Rp 1,78 Triliun pada triwulan dan triwulan II sebanyak Rp. 6,48 Triliun, disusul oleh Kabupaten Konawe dengan investasi sebesar Rp 1,66 Triliun pada triwulan I dan triwulan II sebanyak Rp. 1,89 Triliun. Sementara itu Kabupaten Bombana dan Kota Kendari menempati peringkat selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan industri dan pusat pemerintahan tetap menjadi magnet utama bagi investor.

Beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Konawe Utara (triwulan I Rp. 222,7 miliar dan triwulan II Rp. 192,7 miliar) dan Konawe Selatan (triwulan I Rp. 124,6 miliar dan triwulan II Rp. 185,1 miliar) juga memberikan kontribusi lumayan besar. Sedangkan daerah dengan nilai investasi yang masih relatif rendah seperti Kabupaten Buton Selatan (triwulan I Rp 937,31 juta dan triwulan II Rp. 1,171 miliar) dan Buton Tengah (triwulan I Rp 2,469 miliar dan triwulan II Rp. 1,181 miliar) menunjukkan perlunya peningkatan daya saing dan promosi potensi daerah untuk menarik lebih banyak investasi.

Capaian ini merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan iklim investasi yang

kondusif. Di masa depan, diharapkan investasi di Sulawesi Tenggara terus meningkat dan merata di seluruh kabupaten/kota, guna memperkuat pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

**Tabel 15. TOP 5 INVESTASI SEKTOR UTAMA PMA DI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	SEKTOR PRIMER (PMA)	SEKTOR SEKUNDER (PMA)	SEKTOR TERSIER (PMA)
1	PT Sulawesi Cahaya Mineral (Hongkong, RRT) (07295) Pertambangan Bijih Nikel Kab. Konawe	PT. STARGATE MINERAL ASIA Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Kab. Konawe Utara	PT. STARGATE MINERAL ASIA (Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Kab. Konawe)
2	PT. Virtue Dragon Nickel Industry (RRT) Tiongkok (07295) Pertambangan Bijih Nikel Kab. Konawe Utara	PT. BUKTI MAKMUR RESOURCES Kab. Bombana	PT. BUKTI MAKMUR RESOURCES (Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Kab. Bombana)
3	PT. Wakatobi Resort Singapura (912040) Hitel Bintang Lima Kab. Wakatobi	PT. CERIA KOBALT INDOTAMA Industri logam dasar, Barang logam, bukan mesin dan peralatannya Kab. Kolaka	PT. CERIA KOBALT INDOTAMA (Industri logam dasar, Barang logam, bukan mesin dan peralatannya)
4	PT. Makmur Lestari Primatama Kepulauan Virgin (09900) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya Kota Bau-bau	PT. SINAR NUSANTARA SAKTI Industri logam dasar, Barang logam, bukan mesin dan peralatannya Kab. Konawe utara	PT. PT. SINAR NUSANTARA SAKTI (Industri logam dasar, Barang logam, bukan mesin dan peralatannya)
5	PT. Konawe Nikel Nusantara (07295) Pertambangan Bijih Nikel Kab. Konawe Utara	PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD Industri logam dasar, Barang logam, bukan mesin dan peralatannya Kab. Konawe selatan	PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD (Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain Kab. Konawe selatan)

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 16. TOP 5 INVESTASI SEKTOR UTAMA PMA DISULAWESI  
TENGGERA TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	SEKTOR PRIMER (PMA)	SEKTOR SEKUNDER (PMA)	SEKTOR TERSIER (PMA)
1	Vale Indonesia (Pertambangan Bijih Nikel Kabupaten Kolaka)	Huaxing Nikel Indonesia, (Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya. Kab. Kolaka)	Indonesia Pomala ( <i>Industrial Park</i> , Perumahan, Kawasan Industri dn Perkantoran, Kab. Kolaka)
2	Sulawesi Cahaya Mineral (Pertambangan Biji Nikel Kabupaten Konawe)	Esg Industri Energi Baru (Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Kab. Konawe)	Ipip Port Kolaka , (Perdagangan dan Reparasi, Kab. Kolaka)
3	Sultra Sarna Bumi (Pertambangan Biji Nikel, Kabupaten Konawe Utara)	Kolak Nickel Indonesia (Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Kab. Konawe)	Dokmor Optima Kajayan (Perdagangan dan Reparasi, Kabupaten Konawe Selatan)
4	Makmur Lestari Primata (Pertambangan Bijih Nikel, Kabupaten Konawe Utara)	Virtue Dragon Nikel (Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Kab Konawe)	Intertek Utama (Services, Jasa Lainnya, Kabupaten Konawe)
5	-	Yatoo Mega Smelter Indonesia (Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Kota Kendari)	Wakatobi Resort (Hotel dan Restoran. Kabupaten Wakatobi)

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Tahun 2025

## RENJA – PERUBAHAN 2025

**Tabel 17. Matriks Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Triwulan)				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab		
J e n i s U r u s a n	B i d a n g r a m	P r o g r a m	K e g i a t a n	S u b k e g i a t a n				K i n e r j a	R p.	K i n e r j a	R p.	K i n e r j a	R p.	Triwulan 1		Triwulan 2		K i n e r j a	R p.	K i n e r j a	R p.	K i n e r j a	R p.		K i n e r j a	R p.
														K i n e r j a	R p.	K i n e r j a	R p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6+9)	11(10/5*100)	12															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		320,000,000.00	290,417,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,417,050.00	90.76					DPMPTSP			
2	18	02	101		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	DPMPTSP		

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Potensi Investasi Unggulan Provinsi Sultra yang ditetapkan	Potensi Unggulan	2	320,000,000.00	1	290,418,050.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00	2	290,417,050.00	100	90.76	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	1	70,000,000.00	1	47,375,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	47,375,000.00	100	67.68	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1	250,000,000.00	1	243,043,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	243,042,050.00	100	97.22	DPMPTSP
2	1	0			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>1,550,000,000.00</b>		<b>1,357,857,867.00</b>		<b>150,000,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>85,000,000.00</b>		<b>85,000,000.00</b>		<b>1,442,857,867.00</b>	<b>0</b>	<b>93.09</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	1	0	1	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dokumen	4	1,550,000,000.00		1,357,857,867.00	2	150,000,000.00	2	0.00	0	85,000,000.00	2	85,000,000.00	2	1,442,857,867.00	50	93.09	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	12	300,000,000.00	1	134,080,000.00	4	150,000,000.00	0	0.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	2	219,080,000.00	16.67	73.03	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1,250,000,000.00	4	1,223,777,867.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1,223,777,867.00	400	97.9	DPMPTSP		
2	1	0			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				1,783,060,020.00		1,756,072,705.00		960,072,420.00		602,764,296.00		149,188,086.00		751,952,382.00		2,508,025,087.00	0	140.66	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	861,911,410.00		1,332,391,178.00	0	480,036,210.00	0	122,728,086.00	0	149,188,086.00	0	271,916,172.00	0	1,604,307,350.00	0	186.13	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2051	239,973,910.00	2047	132,391,178.00	51	93,018,110.00	1	54,548,410.00	1	54,548,410.00	2	109,096,820.00	2049	241,487,998.00	99.9	100.63	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	Kegiatan usaha	62	384,904,400.00	2	1,200,000,000.00	51	149,985,000.00	1	46,885,853.00	1	55,735,853.00	2	102,621,706.00	4	1,302,621,706.00	6.45	338.43	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4	237,033,100.00	0	0.00	4	237,033,100.00	1	21,293,823.00	1	38,903,823.00	2	60,197,646.00	2	60,197,646.00	50	25.4	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dokumen	5	921,148,610.00	1	423,681,527.00	3	480,036,210.00	1	480,036,210.00	0	0.00	1	480,036,210.00	2	903,717,737.00	40	98.11	DPMPTSP



## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	730	1,313,111,850.00	700	1,173,080,944,000.00	30	167,585,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	700	1,173,080,944,000.00	95.89	89,335.95	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				<b>100,000,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	1	0	1	0	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	500	100,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dimanfaatkan	Dokumen	500	100,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>12,133,443,878.00</b>		<b>8,332,792,599.00</b>		<b>9,942,165,916.00</b>		<b>2,038,326,068.00</b>		<b>1,418,668,311.00</b>		<b>3,456,994,379.00</b>		<b>11,789,786,978.00</b>		<b>97</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	1	0	1	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	13	174,069,390.00	9	175,315,570.00	14	158,244,900.00	4	38,467,782.00	2	20,798,000.00	6	59,265,782.00	15	234,581,352.00	115.38	135	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	145,265,890.00	2	105,102,640.00	5	132,059,900.00	2	36,517,782.00	1	19,898,000.00	3	56,415,782.00	5	161,518,422.00	100	111	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	12,430,000.00	2	57,226,930.00	3	11,300,000.00	0	0	0	0.00	0	0.00	2	57,226,930.00	66.667	460	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	16,373,500.00	5	12,986,000.00	6	14,885,000.00	2	1,950,000.00	1	900,000.00	3	2,850,000.00	8	15,836,000.00	160	97	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Dokumen	37	10,004,062,526.00	37	5,834,343,800.00	37	8,105,597,182.00	7	1,826,174,716.00	6	1,185,757,295.00	13	3,011,932,011.00	89	8,846,275,811.00	240.54	88	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	111	9,774,406,726.00	51	5,583,405,750.00	113	7,896,819,182.00	2	1,796,794,816.00	2	1,155,186,795.00	4	2,951,981,611.00	55	8,535,387,361.00	49.55	87	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	197,208,000.00	12	202,080,000.00	12	179,280,000.00	1	14,680,000.00	1	26,680,000.00	2	41,360,000.00	14	243,440,000.00	116.67	123	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	11,836,000.00	1	6,050,000.00	1	10,760,000.00	1	9,025,000.00	0	0	1	9,025,000.00	2	15,075,000.00	200	127	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Laporan	12	20,611,800.00	12	42,808,050.00	12	18,738,000.00	3	5,674,900.00	3	3,890,500.00	6	9,565,400.00	18	52,373,450.00	150	254	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Dokumen	1	3,541,670.00	1	3,140,000.00	1	3,219,700.00	0	0	0	0	0	0.00	1	3,140,000.00	100	89	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3,541,670.00	1	3,140,000.00	1	3,219,700.00	0	0	0	0	0	0.00	1	3,140,000.00	100	89	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Dokumen	1	50,000,000.00	10	42,322,690.00	1	5,000,300.00	0	0	0	0	0	0.00	20	42,322,690.00	2000	85	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50,000,000.00	20	42,322,690.00	1	5,000,300.00	0	0	0	0	0.00	20	42,322,690.00	400	85	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Dokumen	44	232,426,760.00	97	365,505,445.00	44	207,823,350.00	9	48,563,090.00	13	53,666,200.00	22	102,229,290.00	119	467,734,735.00	270.45	201	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000.00	0	0.00	1	1,071,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	DPMPTSP	
2	1	0	1	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6,662,260.00	2	16,455,000.00	2	6,056,600.00	0	0.00	1	3,500,000.00	1	3,500,000.00	3	19,955,000.00	150	300	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	23,815,000.00	3	8,258,500.00	3	21,650,000.00	3	3,383,250.00	3	5,000,000.00	6	8,383,250.00	9	16,641,750.00	300	70	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	14	1,655,500.00	14	1,200,000.00	14	1,505,000.00	0	0.00	3	300,000.00	3	300,000.00	17	1,500,000.00	121.43	91	DPMPTSP
	1	0	1	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30,294,000.00	12	43,157,000.00	12	27,540,000.00	3	8,594,000.00	3	1,500,000.00	6	10,094,000.00	18	53,251,000.00	150	176	DPMPTSP
2	1	0	1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	165,000,000.00	66	296,434,945.00	12	150,000,000.00	3	36,585,840.00	3	43,366,200.00	6	79,952,040.00	72	376,386.985.00	600	228	DPMPTSP
	1	0	1	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
	1	0	1	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1	0	1	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Dokumen	3	<b>922,094,863.00</b>	3	<b>490,782,506.00</b>	5	<b>782,963,512.00</b>	0	<b>0.00</b>	0	<b>0.00</b>	0	<b>0.00</b>	95	<b>490,782,506.00</b>	3166.7	53	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	180107	0	1002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	120,000,000.00	15	45,300,000.00	1	570,000,000.00	0	0.00	0	0.000	0	0.00	15	45,300,000.00	375	38	DPMPTSP
	180107	0	1005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	180107	0	1006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	43	656,000,000.00	78	166,000,000.00	8	80,150,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	78	166,000,000.00	181.4	25	DPMPTSP
	180107	0	1007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	180107	0	1001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	146,094,863.00	2	279,482,506.00	1	132,813,512.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	279,482,506.00	200	191	DPMPTSP
2	180108	0	1008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	9	653,401,949.00	9	885,631,262.00	9	594,001,772.00	5	100,579,468.00	4	127,396,816.00	6	227,976,284.00	15	1,113,607,546.00	166.67	170	DPMPTSP
2	180108	0	1001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	4,400,000.00	2	3,050,000.00	2	4,000,000.00	1	500,000.00	0	0.00	1	500,000.00	3	3,550,000.00	150	81	DPMPTSP
2	180108	0	1008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	238,680,279.00	3	394,490,462.00	3	216,982,072.00	3	88,079,468.00	3	34,846,816.00	3	122,926,284.00	6	517,416,746.00	200	217	DPMPTSP
	0108	1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP

## RENJA – PERUBAHAN 2025

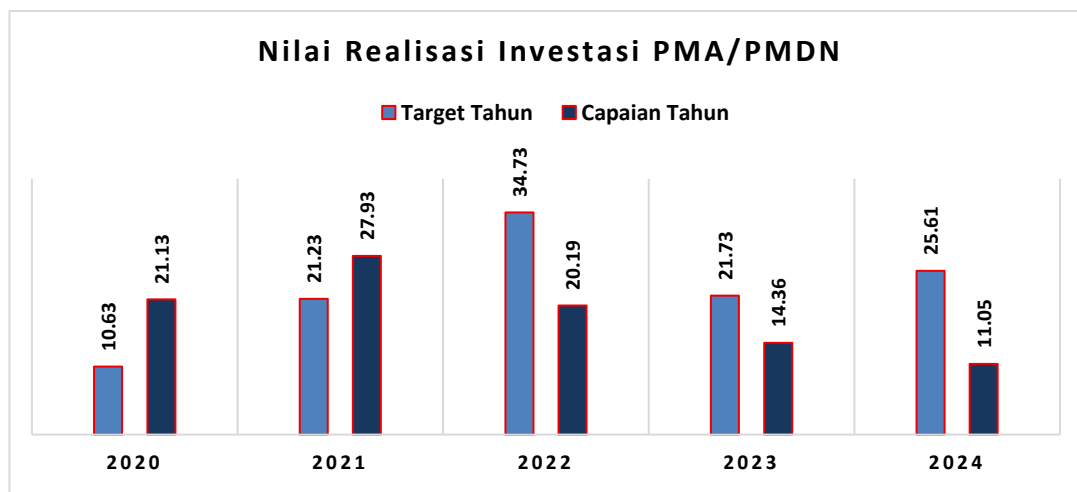
2	1801000008	01000004	10000004	00000004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	410,321,670.00	4	488,090,800.00	4	373,019,700.00	1	12,000,000.00	1	92,550,000.00	2	104,550,000.00	6	592,640,800.00	150	144	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	3	93,846,720.00	3	535,751,326.00	3	85,315,200.00	4	24,541,012.00	3	31,050,000.00	7	55,591,012.00	25	591,342,338.00	833.33	630	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	56,683,000.00	5	58,333,826.00	15	51,530,000.00	4	24,541,012.00	2	950,000.00	6	25,491,012.00	11	83,824,838.00	68.75	148	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	4,026,000.00	12	18,800,000.00	23	3,660,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	18,800,000.00	52.174	467	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33,137,720.00	1	458,617,500.00	1	30,125,200.00	0	0.00	1	30,100,000.00	1	30,100,000.00	2	488,717,500.00	200	1,475	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP
2	1801000009	01000009	10000009	00000011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	DPMPTSP

### BAB III

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2025

Perubahan dalam Rencana Kerja didasarkan pada perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2025 dan kebijakan efisiensi anggaran dan belanja publik di tingkat pusat dan daerah. Salah satu hal yang terdampak adalah target realisasi investasi mengalami penurunan yang sebelumnya Rp. 25.61 Triliun menjadi Rp. 13.28 Triliun berdasarkan hasil diskusi Rapat Evaluasi Realisasi Investasi yang dihadiri oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan 38 DPMPTSP Provinsi se-Indonesia pada bulan Februari 2025 hal ini didukung oleh Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN mengalami tren penurunan selama 4 tahun terakhir.

**Gambar 7. Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN 2020-2024**



Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Tahun 2020-2024

Perubahan juga terjadi pada 3 program kerja yaitu Pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), “*Same Day Service* Tanpa Pungli” dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Kesiediaan Pelaku Usaha PMA/PMDN dalam memenuhi kewajiban terhadap daerah yang mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sehingga dialihkan menjadi satu kesatuan bergabung dalam

program Sultra *Investment Summit* (SIS) – Rapat Koordinasi Percepatan Investasi. Dalam pelaksanaannya, “*Same Day Service* Tanpa Pungli” dan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

Penandatanganan Pernyataan Komitmen Kesiediaan Pelaku Usaha PMA/PMDN tidak memerlukan anggaran khusus sehingga melekat pada kegiatan Sultra *Investment Summit* (SIS). Sultra *Investment Summit* (SIS) menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong iklim investasi yang kondusif di Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk komitmen bersama dalam peningkatan pelayanan publik yang transparan dan responsif. Dengan pendekatan ini diharapkan proses perizinan dapat berlangsung cepat, efisien, dan memberikan kepastian bagi para Investor.

Selain itu, Perubahan rencana kerja juga diiringi dengan peningkatan beban kerja dan kebutuhan organisasi. Untuk memperluas cakupan layanan, maka dilakukan penyesuaian struktur kepegawaian melalui penambahan jumlah pegawai yang terdiri dari 49 pegawai CPNS (1 CPNS golongan II dan 48 CPNS golongan III tahun 2025) dan 11 pegawai PPPK (10 PPPK Tahap I dan 1 PPPK Tahap 2 tahun 2025). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut diperlukan penyesuaian anggaran, khususnya pada bagian belanja pegawai. Kenaikan anggaran ini mencakup kebutuhan gaji pokok, tunjangan serta pengeluaran lain yang berkaitan langsung dengan kepegawaian seperti pelatihan orientasi dan pengadaan fasilitas kerja dasar. Perubahan anggaran ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efektifitas kinerja serta mendukung pencapaian target organisasi secara optimal.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdapat perubahan nomenklatur antara Renja awal dan Renja perubahan yang disebabkan oleh acuan regulasi yang digunakan. Nomenklatur Renja awal disusun berdasarkan Kepmendagri NO. 050-5889 Tahun 20 21 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menekankan penyusunan dokumen perencanaan awal secara komprehensif sedangkan Renja Perubahan ini disusun

## RENJA – PERUBAHAN 2025

dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memberikan ruang bagi penyusunan nomenklatur sesuai kebutuhan perubahan selama tahun anggaran berjalan.

Dalam Renja Perubahan DPMPTSP Provinsi Sultra tahun 2025 terdapat 5 Program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **PROVINSI**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

##### **d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## **RENJA – PERUBAHAN 2025**

### **e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

### **a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

## **3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

## **RENJA – PERUBAHAN 2025**

a. **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

#### **4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

a. **Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah**

**Kabupaten/Kota**

1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### **5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

a. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi**

**Kewenangan Daerah Provinsi**

1. Pengawasan Penanaman Modal
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

## RENJA – PERUBAHAN 2025

Tabel 18. MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Sebelum Perubahan	Kinerja Hasil Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif	Lokasi Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Sesudah Perubahan		Pagu Indikatif Sesudah Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan atau Pergeseran Pagu
					Hasil/Keluaran				Hasil / Keluaran			
					Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2 1 8	Bidang Penanaman Modal						14,986,138,000				10,930,067,426	Penyesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100%	10.604.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	81,58%	9,942,165,916	Penyesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran
2	1	0	1.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang disusun	13 Dokumen	355.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	158.244.900	Dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan melibatkan DPMPTSP se-Sultra, Kementerian Investasi, dan pelaku usaha

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	132.059.900	Dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan melibatkan DPMPTSP se-Sultra, Kementerian Investasi, dan pelaku usaha
2	1	0	1.	0	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	11.300.000	Penyesuaian dengan kebutuhan berupa perjalanan dinas karena adanya agenda dari pemda Provinsi Sultra maupun undangan dari kementerian
2	1	0	1.	0	0	0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 Dokumen	50,000,000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	50.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	14.885.000	Menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan, koordinasi menggunakan anggaran Rakor
	1 8	0 1	1. 01	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	55.000.000	-	-	-	-	-
2	1 8	0 1	1. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	6.785.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 Dokumen	8,105,597,182	Menyesuaikan dengan kebutuhan



## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1801	1.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.760.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1801	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-
2	1801	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	60.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	12 Laporan	18.738.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 02	0 0 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	
2	1 8	0 1	1. 03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Kendari</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>3.219.700</b>	<b>Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>
2	1 8	0 1	1. 03	0 0 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.219.700	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

						usaha berbasis inovasi dan kearifan total										
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-
2	18	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Kepegawaian	5 Laporan	376.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.300	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 05	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik total	Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	216.000.000	-	-	-	-	-
2	1 8	0 1	1. 05	0 0 0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 05	0 0 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	
2	1 8	0 1	1. 05	0 0 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5.000.300	Menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2	1 8	0 1	1. 05	0 0 1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	50.000.000	-	-	-	-	
2	1 8	0 1	1. 05	0 0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	50.000.000	-	-	-	-	

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Umum	122 Laporan	1,324,000,000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	45 Dokumen	207.823.350	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 06	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.071.750	Menyesuaikan dengan kebutuhan



## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 06	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	50.000.000	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	21.650.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 06	0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	5.000.000	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	1.505.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 06	0 0 0 7	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	-	-	-	-	-
2	1 8	0 1	1. 06	0 0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	54.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.540.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 06	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	500.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 06	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-
2	1 8	0 1	1. 06	0 0 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	13 Unit	1.965.000.000	Kendari	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 dokumen	782.963.512	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 07	0 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	65.000.000	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	570.000.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	500.000.000	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	80.150.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0	1.	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 07	0 0 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	132.813.512	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total</b>	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	17 Laporan	1.020.000.000	Kendari	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 dokumen	594.001.772	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 1	1. 08	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	15.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 1	1. 08	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	600.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	216.982.072	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	400.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	373.019.700	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0	1.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	47 unit	1.588.000.000	Kendari	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	85.315.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total  Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	200.000.000	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.530.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0	1.	0	0	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Set	3.000.000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	35.000.000	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	3.660.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0	1.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	500.000.000	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.125.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 Paket	400.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 Paket	450.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi</b>	<b>2 investor</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Kendari</b>	<b>Realisasi Total terhadap Target Investasi</b>	<b>20.18%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Daerah Provinsi</b>	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000.000</b>	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 2	1. 02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi Unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan</b>	6 potensi unggulan	600.000.000	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	1 Dokumen	50.000.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 2	1. 02	0 0 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Perda	350.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Peta Potensi	250.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah media promosi penanaman modal</b>	<b>4 Media</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi</b>	<b>19.71%</b>	<b>288.528.000</b>	<b>Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1 8	0 3	1. 01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kegiatan	1.850.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2 dokumen	288.528.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 3	1. 01	0 0 0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	4 Dokumen	1.500.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	265.020.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	350.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	23.508.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan</b>	<b>85.00 Poin</b>	<b>1.070.000.000</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan</b>	<b>28.15%</b>	<b>480.036.210</b>	<b>Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.			Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Terkait Penyelenggaraan Perizinan yang disusun	21 Dokumen	680.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	480.036.210	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0	1.	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan Usaha	20.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas,	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	-	-	-	-	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	93.018.110	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

						optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total										
2	1	0	1.	0	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	-	-	-	-	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	100 Kegiatan Usaha	149.985.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0	1.	0	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan	10 Orang	660.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	40 Pelaku Usaha	237.033.100	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

					Berusaha Berbasis Risiko	dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total			Masyarakat Terkait Perizinan dan Nonperizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
2	1	0	1.		<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Izin Kewenangan Daerah Provinsi yang Diterbitkan</b>	<b>500 Izin</b>	<b>390.000.0000</b>	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

2	1	0	1.	0	0	0	1	0	0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	50 Orang	60.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0	1.	0	0	0	2	0	0	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	12 Kegiatan Usaha	330.000.000	-	-	-	-	-
2	1	0									<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN</b>	<b>Rp. 22 Triliun</b>	<b>1.375.000.000</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha</b>	<b>100%</b>	<b>169.337.300</b>	<b>Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>

## RENJA – PERUBAHAN 2025

						daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total										
2	1 8	0 5	1. 01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 22 Triliun	1.375.000.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 13.28 Triliun	169.337.300	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1 8	0 5	1. 01	0 0 4	Pengawasan Penanaman Modal	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam,	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	17 Kabupaten/ Kota Se- Sultra	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	45 Proyek	472.500.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian	50 Kegiatan Usaha	14.289.400	Menyesuaikan dengan kebutuhan

## RENJA – PERUBAHAN 2025

						penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total												Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
2	1	0	1.	0	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas, optimalisasi potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan total	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	17 Kabupaten/ Kota Se-Sultra	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	950 Orang	902.500.000	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22 Kegiatan Usaha	155.047.900		Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	1	0				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Dalam dan Luar Daerah</b>	<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan Melalui Aplikasi</b>	<b>2 Hari</b>	<b>70.000.000</b>	-	-	-	-	-	-
2	1	0	1.			Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada	1 Dokumen	70.000.000	-	-	-	-	-	-

## RENJA – PERUBAHAN 2025

					pada Tingkat Daerah Provinsi				Tingkat Daerah Provinsi							
2	1	0	1.	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	600 Dokumen	70.000.000	-	-	-	-	-

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Renja Perubahan DPMPTSP 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ada pun berbagai faktor yang melandasi perubahan Renja DPMPTSP Provinsi Sultra tahun 2025, antara lain :

- A. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi khususnya terkait perencanaan dan penganggaran
- B. Perubahan gambaran kondisi ekonomi daerah khususnya terkait sektor investasi
- C. Penyesuaian prioritas daerah
- D. penyesuaian sasaran daerah
- E. perubahan lokasi
- F. penambahan atau pengurangan target kinerja
- G. penyesuaian pagu indikatif

### 4.2 Saran

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Provinsi Sultra Tahun 2025 ini diharapkan terlaksana secara terarah, terukur dan terkendali, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.

Kendari, 4 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



**PARINRINGI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
NIP. 19771014 200312 1 007

